

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan Inflasi di Kota Depok sepanjang Triwulan II tahun 2026 menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas pangan dan penyesuaian ekonomi musiman. Setelah mengalami lonjakan tajam pada awal tahun, inflasi April 2026 kembali bergerak ke pola yang lebih terkendali. Inflasi tahunan tercatat turun ke 2,22% (YoY), dari 3,45% (YoY) pada Maret 2026 dan jauh lebih rendah dibandingkan 4,56% (YoY) pada Februari 2026. Penurunan ini menunjukkan memudarnya tekanan yang sempat mendorong inflasi Januari sampai Maret, terutama akibat efek basis rendah dari diskon tarif listrik pada awal 2025 serta tekanan permintaan selama Ramadan dan Idul Fitri. Namun demikian, ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah masih menekan harga domestik melalui harga bahan bakar, avtur, transportasi, dan beberapa komoditas.

Pada bulan April 2026 terjadi inflasi *y-on-y* sebesar 2,22%, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,31 pada April 2025 menjadi 110,71 pada April 2026. Tingkat deflasi *m-to-m* dan tingkat inflasi *y-to-d* masing-masing sebesar -0,01% dan 1,11%.

Secara tahunan, dinamika inflasi April 2026 antar kelompok pengeluaran mengalami pergeseran yang cukup signifikan dibandingkan Maret 2026. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang sebelumnya menjadi penyumbang andil terbesar dengan inflasi 6,19% (YoY) pada Maret 2026, kini mencatat perlambatan tajam menjadi hanya 0,42% (YoY) pada April 2026. Penurunan ini mencerminkan berakhirnya pengaruh *low-base effect* akibat diskon tarif listrik 50% di awal tahun 2025. Seiring meredanya tekanan dari kelompok tersebut, dominasi andil inflasi tahunan April 2026 beralih ke kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi 3,64% (YoY), meningkat dibandingkan pada Maret 2026 yang sebesar 3,29% (YoY). Di sisi lain, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya masih mencatatkan inflasi yang tinggi dan sudah melandai, yakni 11,81% (YoY) pada April 2026, turun dari 21,02% (YoY) pada Maret 2026. Penurunan ini sejalan dengan penguatan dolar AS yang mengubah arah permintaan global sehingga menyebabkan koreksi harga emas perhiasan di pasar global.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y* pada April 2026, antara lain emas perhiasan, beras, daging ayam ras, sigaret kretek mesin (SKM), upah asisten rumah tangga, nasi dengan lauk, minyak goreng, air kemasan, sekolah dasar, dan ayam bakar. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi *y-on-y*, antara lain: bawang merah, bawang putih, cabai merah, tarif kendaraan roda 2 online, popok bayi sekali pakai/diapers, pembersih lantai, sabun mandi cair, sabun detergen bubuk, angkutan antar kota, dan obat gosok.

Dari sisi bulanan, pada April 2026 tercatat deflasi sebesar -0,01% (mtm), jauh lebih rendah dibandingkan April 2025 yang mengalami inflasi sebesar 0,13% (mtm). Penurunan yang cukup dalam ini terutama ditopang oleh deflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,81% dengan andil deflasi 0,23 persen poin, didorong oleh penurunan harga emas. Tren penurunan harga emas berlanjut di tengah ketidakpastian global seiring beralihnya permintaan aset menjadi likuiditas. Sementara itu, pada kelompok transportasi juga turut menjadi penyumbang deflasi bulanan terbesar kedua pada April 2026 dengan tingkat deflasi 0,50% (mtm) dan andil 0,03 persen poin. Tekanan ini terutama bersumber dari kenaikan tarif angkutan udara yang secara bulanan meningkat seiring kenaikan harga avtur di seluruh

bandara dalam negeri, serta kenaikan harga bensin non-subsidi. Adapun komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi *m-to-m* pada April 2026, antara lain: emas perhiasan, daging ayam ras, angkutan antar kota, sabun mandi cair, dan telur ayam ras.

Pada bulan Mei 2026 terjadi inflasi *year on year (y-on-y)* Kota Depok sebesar 2,88% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,04, dan tingkat inflasi *m-to-m* serta inflasi *y-to-d* masing-masing sebesar 0,30% dan 1,42%. Inflasi Mei 2026 mengalami kenaikan setelah sempat melandai pada April 2026. Inflasi tahunan mengalami kenaikan, naik dari 2,22% (YoY) pada April 2026, sementara inflasi bulanan meningkat dari yang sebelumnya deflasi -0,01% (mtm) menjadi 0,30% (mtm). Kenaikan ini berbeda dari pola Mei 2025 yang mengalami deflasi sebesar -0,35% (mtm). Perbedaan ini penting karena Mei 2025 masih mencerminkan koreksi harga setelah puncak permintaan Ramadhan dan Idul Fitri yang relatif kuat, terutama dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami deflasi sebesar -1,31% (mtm). Sebaliknya, pada Mei 2026, sejumlah harga pangan justru meningkat, disertai tekanan dari energi dan biaya transportasi. Tekanan tersebut juga diperkuat oleh faktor musiman perayaan Idul Adha, yang pada 2026 jatuh pada akhir Mei, berbeda dengan 2025 ketika perayaan ini berlangsung pada Juni

Secara tahunan, inflasi pada Mei 2026 ditopang oleh dinamika yang cukup beragam antar kelompok pengeluaran. Kelompok makanan minuman dan tembakau masih menjadi penyumbang andil terbesar dengan inflasi 5,41% (YoY) dan andil 1,49% persen poin. Namun demikian, angka ini mencerminkan kenaikan yang cukup tajam dari 3,06% (YoY) pada Mei 2025.

Komoditas yang dominan memberikan andil/ sumbangan inflasi *y-on-y* pada Mei 2026, antara lain: emas perhiasan, beras, minyak goreng, sigaret kretek mesin (SKM), upah asisten rumah tangga, bawang merah, daging ayam ras, nasi dengan lauk, pepaya, dan kue basah. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi *y-on-y*, antara lain: bawang putih, tarif kendaraan roda 2 online, pembersih lantai, popok bayi sekali pakai/ diapers, tomat, sabun mandi cair, obat gosok, sabun detergen bubuk, pengharum cucian/ pelembut, dan makanan ringan/ snack.

Secara historis, bulan Juni kerap mencatat inflasi akibat faktor musiman dan meningkatnya konsumsi masyarakat. Kenaikan ini terutama dipicu oleh gejolak harga pangan; lonjakan permintaan barang konsumsi berkenaan dengan momen perayaan Idul Adha, Tahun Baru Islam 1447 Hijriah, dan libur sekolah. Inflasi Juni 2026 Kota Depok kembali meningkat setelah sempat melandai pada dua bulan sebelumnya. Pada bulan Juni 2026 inflasi *year on year (y-on-y)* Kota Depok tercatat sebesar 3,07% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,51, dan inflasi *m-to-m* dan tingkat inflasi *y-to-d* masing-masing sebesar 0,42 persen dan 1,84 persen. Secara bulanan, inflasi Juni 2026 meningkat dari 0,30% (mtm) menjadi 0,42% (mtm) dimana tekanan harga ini -berasal dari kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya serta makanan, minuman dan tembakau. Pada Juni 2026, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi tertinggi sebesar 10,35% (YoY), dengan andil 0,54% terhadap total inflasi umum. Lonjakan signifikan ini terutama didorong oleh tren kenaikan harga emas perhiasan seiring peralihan pola konsumsi masyarakat yang memprioritaskan aset bernilai di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Komoditas yang dominan memberikan andil/ sumbangan inflasi *y-on-y* pada Juni 2026, antara lain: emas perhiasan, beras, bensin, minyak goreng, sigaret kretek mesin (SKM), bawang merah, upah asisten rumah tangga, air kemasan, nasi dengan lauk, dan cabai merah.

Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: tarif kendaraan roda 2 online, telur ayam ras, bawang putih, popok bayi sekali pakai/diapers, tomat, pembersih lantai, obat gosok, sabun mandi cair, tarif kendaraan roda 4 online dan bawang bombay

Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m, antara lain bensin, air kemasan, laptop/notebook, upah asisten rumah tangga, dan beras. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m pada Juni 2026, antara lain: daging ayam ras, telur ayam ras, pasta gigi, cabai rawit, dan tarif kendaraan roda 4 online.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Keterbatasan lahan pertanian mengakibatkan tingginya ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah; Kota Depok bukanlah daerah produsen pertanian utama. Sebagian besar komoditas pangan penting seperti beras, cabai, bawang, dan daging didatangkan dari wilayah lain di Jawa Barat, Jawa Tengah, atau daerah penyangga lainnya. Kerentanan distribusi, jika terjadi gagal panen di daerah produsen atau hambatan pada jalur logistik/distribusi menuju Jabodetabek, pasokan di Depok akan langsung terganggu, yang memicu lonjakan harga pasar di Kota Depok.

2. Kerentanan rantai pasok akibat tingginya mobilitas wilayah metropolitan; Sebagai bagian dari kawasan metropolitan Jabodetabek, pergerakan harga di Kota Depok sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan kondisi ekonomi DKI Jakarta dan sekitarnya. Rantai distribusi dari pasar induk penyuplai menuju pedagang eceran di Depok yang cukup panjang berpotensi meningkatkan margin harga. Perlunya pengawasan intensif untuk memastikan tidak ada praktik spekulasi atau penimbunan barang pokok oleh oknum di tingkat lokal saat pasokan sedang menipis.

3. Siklus tahunan seperti **Tahun Ajaran Baru Sekolah** juga sering menjadi penyumbang inflasi non-pangan yang signifikan di Depok, mengingat kota ini memiliki basis populasi pelajar dan mahasiswa yang sangat besar.

4. Tingginya volatilitas harga komoditas pangan bergejolak; Komoditas pangan tertentu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, daging ayam dan beras masih menjadi penyumbang utama inflasi Kota Depok pada momentum Ramadhan, Idul Fitri, Natal, Tahun Baru maupun saat gangguan cuaca ekstrem.

5. Belum optimalnya integrasi data harga, stok, distribusi dan konsumsi antar perangkat daerah; Monitoring harga harian telah dilakukan, namun analisis prediktif mengenai potensi kenaikan harga masih perlu diperkuat untuk mengantisipasi lonjakan harga.

6. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Belum Optimal; Ketersediaan cadangan pangan strategis masih terbatas untuk mengantisipasi lonjakan permintaan pada masa Hari Besar Keagamaan maupun kondisi darurat

7. Kerjasama Antar Daerah belum sepenuhnya berbasis rantai pasok jangka panjang;

8. Belum terbangunnya sistem informasi neraca pangan daerah secara real time

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Upaya pengendalian inflasi melalui strategi 4K pada Triwulan II Tahun 2026 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok diantaranya :

◦ Keterjangkauan Harga

1. Melaksanakan kegiatan pemantauan harga harian barang kebutuhan pokok di tempat agen/distributor dan pasar rakyat yang ada di Kota Depok meliputi ; Pasar Agung, Pasar Cisalak, Pasar Tugu, Pasar Sukatani, Pasar Kemiri Muka terhadap 29 komoditas dengan 62 varian;
2. Melakukan kegiatan pemantauan stok barang kebutuhan pokok di pasar rakyat yang ada di Kota Depok dan dilakukan satu kali dalam seminggu terhadap 13 komoditas diantaranya ; beras, gula pasir, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, tepung terigu, mie instan, cabe, bawang merah dan bawang putih;
3. Melaksanakan monitoring/pengecekan stok bersama tim koordinasi dan sinkronisasi ke pasar rakyat, toko swalayan, agen dan distributor di Kota Depok, khususnya pada momentum HBKN dan periode waktu tertentu;
4. Melakukan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi yang terdata di DTSEN sebesar @ 23 juta rupiah, sampai dengan selesai pendidikan (bekerjasama dengan 25 Perguruan Tinggi);
5. Melakukan pemberian bantuan barang untuk pengembangan usaha ekonomi kepada 50 orang UMKM yang masuk ke dalam desil 1-5;
6. Melakukan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi siswa SD dan SMP dari keluarga tidak mampu (miskin/rentan miskin) yang terdata didalam DTSEN;
7. Pemberian bantuan insentif bagi guru swasta di tingkat PAUD, SD dan SMP;
8. Memberikan bantuan dukungan pembiayaan pendidikan melalui program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG);
9. Melakukan kegiatan pendampingan untuk peningkatan usaha UMKM melalui ; motivasi, fotografi, videografi, desain kemasan dan digital marketing.
10. Melaksanakan workshop kewirausahaan untuk peningkatan kapasitas UMKM;
11. Melakukan monitoring pelaksanaan upah minimum kota pada 16 perusahaan di Kota Depok yang meliputi ketaatan pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Kota.

◦ Ketersediaan Pasokan

1. Melaksanakan kegiatan bazar pasar tani sebanyak 2 (dua) kali pada bulan april dan juni untuk memasarkan produk hasil pertanian Kota Depok;
2. Melaksanakan kegiatan Gerakan Pangan Murah pada tanggal 7 April 2026 di Kelurahan Cisalak;
3. Memfasilitasi kegiatan Gerakan Pangan Murah dari Bapanas, Bank Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat sebanyak 5 (lima) bertempat di Kelurahan Cisalak, Tugu, Kalibaru, Kukusan dan Balaikota Depok
4. Melaksanakan produksi benih ikan konsumsi dalam rangka mendukung ketersediaan ikan, kegiatan ini menghasilkan produksi benih ikan konsumsi sebanyak 107.500 ekor benih;
5. Melaksanakan pelayanan pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan dalam rangka mendukung penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal. Selama triwulan II Rumah Potong Hewan telah melaksanakan pemotongan hewan sebanyak 2.312 ekor setara dengan 578.000 kg daging;
6. Melaksanakan pemanfaatan lahan tidur untuk produksi pertanian bekerjasama dengan TNI dan Polri. Dalam kegiatan ini telah dilakukan penyediaan bibit dan benih tanaman untuk dibagikan kepada masyarakat maupun instansi sebagai stimulan dalam

pemanfaatan lahan tidur;

7. Melaksanakan kegiatan pengawasan keamanan pangan di pasar rakyat maupun toko modern yang ada di Kota Depok bekerjasama dengan BPOM;
8. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemenuhan komitmen SPP-IRT (sertifikasi pemenuhan komitmen pangan olahan industri rumah tangga) dengan kegiatan kunjungan langsung ke sarana IRTIP untuk memastikan penerapan cara produksi pangan yang baik;

- Kelancaran Distribusi

1. Menyusun kajian/kebijakan terkait dengan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan dan/atau barang (moda share, kinerja angkutan penumpang umum evaluasi jaringan lintas batas dan pola pergerakan masyarakat angkutan umum Kota Depok;
2. Melakukan kerjasama penyediaan angkutan penumpang “Biskita Trans Depok” dan “Mikro Trans Depok” dengan instansi pusat swasta;
3. Melakukan koordinasi lintas sektor terkait pengaturan jam operasional angkutan barang untuk jalan lintas provinsi dan nasional;
4. Melakukan pengamanan lalu lintas barang menuju pusat distribusi barang;
5. Melakukan penyediaan sarpras penerangan jalan pada lintasan angkutan barang (PJU);
6. Melakukan kegiatan pemeliharaan dan rehab pasar rakyat untuk memastikan tersedianya ruang usaha demi kelancaran distribusi perdagangan.

- Komunikasi Efektif

1. Melakukan penginputan perkembangan harga barang kebutuhan pokok harian ke dalam Sistem Informasi Perdagangan (Sifordagin) dan terintegrasi dengan pengendalian inflasi milik Provinsi Jawa Barat (Silinda Jabar) dan diinput juga dalam SP2KP sistem informasi milik Kementerian Perdagangan untuk pasar pantauan;
2. Melakukan sosialisasi konsumsi pangan beragam bergizi seimbang aman melalui pangan lokal (diversifikasi pangan) bekerjasama dengan TP PKK Kota Depok;
3. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi *High Level Meeting* TPID untuk memperkuat sinergi pengendalian inflasi lintas sektor dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan bahan kebutuhan pokok serta merumuskan langkah strategis pengendalian inflasi;
4. Menyelenggarakan workshop untuk meningkatkan kapasitas anggota TPID

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- Pengendalian inflasi harus menjadi perhatian semua pihak. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, pada Triwulan II Tahun 2026 ini, Masa Liburan dan Tahun Ajaran Baru Pendidikan juga memberikan dampak positif bagi pergerakan roda perekonomian di Kota Depok. Namun demikian berbagai faktor tersebut tidak menyebabkan tingkat Inflasi meningkat secara berlebihan sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga;
- Kegiatan-kegiatan terkait upaya pengendalian inflasi telah banyak dilakukan oleh Perangkat Daerah anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Depok, namun demikian perlu lebih ditingkatkan kembali koordinasi dan sinergi agar upaya kolaborasi yang dilakukan bisa mendapatkan hasil yang lebih optimal.
- Koordinasi semua pihak, terutama kolaborasi dan sinergi diantara Perangkat Daerah Pemerintah Kota Depok perlu terus diperkuat sehingga pihak terkait dapat mensinergikan berbagai kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan serta semakin memperkuat komitmen semua pihak dalam mengupayakan pengendalian inflasi yang lebih efektif.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok untuk menanggulangi berbagai isu pengendalian inflasi pada Triwulan II Tahun 2026 adalah:

1. Mengintensifkan Pemantauan Pergerakan Harga Secara Harian; Melakukan pemantauan harga kebutuhan bahan pokok secara harian, utamanya beras, aneka cabai, aneka bawang, daging dan telur ayam ras, daging sapi, minyak goreng dan gula pasir. Lebih lanjut, TPID dapat memanfaatkan Aplikasi Sifordagin dan Silinda di Jabar untuk melakukan pemantauan kenaikan/penurunan harga pangan untuk pengambilan kebijakan yang lebih responsif dan cepat. Pengembangan urban farming produktif di Kota Depok; Mengoptimalkan gerakan menanam di seluruh lapisan masyarakat, khususnya komoditas pangan penyumbang inflasi.
2. Memastikan Ketersediaan Stok dan Pasokan Bahan Pokok Penting serta Pemasaran via Platform Digital; Memastikan ketersediaan stok dan pasokan bahan kebutuhan pokok di wilayah masing-masing, baik yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, maupun stok yang berada di gudang, pasar rakyat dan pasar ritel modern. Platform perdagangan online juga dapat dijadikan alternatif pemenuhan kebutuhan maupun pemasaran barang kebutuhan pokok terutama untuk meningkatkan transaksi secara digital di Kota Depok dan meningkatkan omzet pedagang serta memudahkan masyarakat selaku pembeli;
3. Memastikan Efektivitas Penetapan Lokasi, Waktu dan Frekuensi Operasi Pasar Murah Bersubsidi;
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar Murah Bersubsidi dalam rangka memastikan efektivitas penetapan lokasi, waktu dan frekuensinya. Operasi Pasar Murah yang dilakukan oleh pihak di luar pemerintah Kota Depok diupayakan berkoordinasi dengan TPID untuk menghindari potensi ketidaktepatan penyaluran dan memastikan pemerataannya;
5. Mengantisipasi peningkatan pengeluaran yang harus ditanggung oleh orangtua calon peserta didik pada tahun ajaran baru dengan berupaya berkoordinasi dengan stakeholder pendidikan negeri maupun swasta agar dapat meminimalisir biaya pendidikan atau menyediakan keringanan dengan metode pembayaran cicilan biaya pendidikan sekolah;
6. Memperkuat kerjasama antar daerah dalam rangka pemenuhan ketersediaan pasokan pangan di Kota Depok.
7. Memperkuat sinergi antar perangkat daerah dan lintas sektor untuk langkah pengendalian inflasi yang efektif.